

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

SDGs poin 16 menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Rwanda, sebagai negara yang berhasil bangkit pasca-genosida 1994, menunjukkan komitmen kuat terhadap pencapaian SDGs melalui kebijakan strategis National Strategy for Transformation (NST1) yang diimplementasikan sejak 2017 hingga 2024. NST1 dirancang sebagai kerangka pembangunan jangka menengah yang menyentuh berbagai sektor, termasuk tata kelola pemerintahan, akses keadilan, dan mekanisme anti-korupsi, yang sejalan dengan tujuan SDGs poin 16. Meskipun Rwanda mencatat skor SDGs Index yang tinggi secara keseluruhan di kawasan Afrika Timur, capaian pada poin 16 menunjukkan penurunan, menandakan adanya tantangan dalam mewujudkan tata kelola yang sepenuhnya inklusif dan transparan. Namun demikian, NST1 tetap menjadi instrumen utama dalam mendorong transformasi kelembagaan dan sosial, serta memperkuat fondasi perdamaian dan keadilan sebagai bagian dari visi pembangunan Rwanda menuju 2030.

Kebijakan Rwanda dalam mencapai SDGs poin 16 melalui National Strategy for Transformation (NST1) periode 2017–2024 menunjukkan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif terhadap pembangunan kelembagaan, tata kelola pemerintahan, dan akses keadilan. NST1 dirancang sebagai strategi pembangunan nasional jangka menengah yang tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi perdamaian dan integritas kelembagaan sebagai bagian dari visi pembangunan berkelanjutan. Melalui NST1, Rwanda mengimplementasikan berbagai program yang melibatkan aktor pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mendorong transparansi, efektivitas birokrasi, serta mekanisme anti-korupsi. Meskipun terdapat tantangan dalam efisiensi kelembagaan dan dinamika sosial-politik, NST1 tetap menjadi instrumen utama dalam mendorong pencapaian SDGs poin 16. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Rwanda berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan pembangunan berbasis hak dalam kerangka kebijakan nasional, meskipun capaian indeks SDGs poin 16 belum sepenuhnya mencerminkan ambisi tersebut.

Keberhasilan implementasi NST1 sangat dipengaruhi oleh faktor konten kebijakan dan konteks implementasi. Dari sisi konten, NST1 telah memuat agenda transformasi tata kelola, penguatan institusi hukum, serta digitalisasi layanan publik. Namun, dari sisi konteks, terdapat keterbatasan berupa ruang demokrasi yang sempit, kontrol media, dan tekanan terhadap oposisi politik. Hal ini menyebabkan kebijakan yang secara substansi progresif tidak sepenuhnya menghasilkan peningkatan signifikan pada indikator tata kelola yang diukur dalam SDGs poin 16.

Pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari perluasan kebebasan substantif masyarakat. Rwanda memang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 6–7% per tahun selama periode NST1, menurunkan angka kemiskinan, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan. Namun, kebebasan politik, kebebasan sipil, dan kebebasan pers masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan demokratis, sehingga pencapaian SDGs poin 16 tidak optimal.

Implementasi NST1 Rwanda dalam mencapai SDGs poin 16 berdasarkan teori Merilee Grindle menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki struktur yang cukup kuat dalam aspek isi kebijakan maupun konteks implementasinya. Dari sisi isi kebijakan, NST1 dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat luas dengan manfaat berupa peningkatan akses keadilan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penguatan institusi hukum. Perubahan yang diharapkan bersifat sistemik, dengan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan aktor lintas sektor dan dukungan sumber daya yang signifikan. Sementara itu, dalam konteks implementasi, Rwanda menunjukkan adanya strategi aktor yang terkoordinasi, karakter kelembagaan yang stabil pasca-konflik, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas masyarakat yang cukup tinggi. Meskipun terdapat tantangan birokrasi dan penurunan skor SDGs poin 16 pada tahun 2023, NST1 tetap menjadi instrumen utama dalam mendorong reformasi kelembagaan dan tata kelola yang inklusif. Dengan demikian, teori Grindle relevan untuk menilai efektivitas NST1 sebagai kebijakan pembangunan yang berkontribusi terhadap pencapaian SDGs poin 16.

Hasil akhir analisis menunjukkan bahwa indeks SDGs poin 16 di Rwanda mengalami tren awal penurunan dan kemudian stagnan pada periode 2017–2024. Stagnasi ini mencerminkan bahwa meskipun ada perbaikan dalam aspek efisiensi birokrasi, rule of law, dan tata kelola administrasi, faktor kebebasan sipil dan demokrasi yang terbatas menjadi penghambat utama peningkatan indeks. Dengan kata lain, Rwanda berhasil menjaga stabilitas institusi, tetapi belum mampu memperluas ruang kebebasan politik dan sipil yang menjadi inti dari SDGs poin 16.

Secara keseluruhan, kesimpulan penelitian ini adalah bahwa implementasi NST1 di Rwanda telah memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan institusi dan stabilitas pemerintahan, tetapi pencapaian SDGs poin 16 masih stagnan karena keterbatasan demokrasi, kontrol media, dan represi terhadap oposisi. Analisis dengan teori Grindle menekankan pentingnya konteks politik dalam keberhasilan kebijakan, sementara teori Sen menegaskan bahwa pembangunan sejati harus mencakup kebebasan substantif. Oleh karena itu, untuk mencapai peningkatan indeks SDGs poin 16 di masa mendatang, Rwanda perlu menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perluasan kebebasan politik, sipil, dan media.

Rwanda memang berhasil menjaga stabilitas politik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang konsisten, namun pencapaian SDGs poin 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions) masih menghadapi tantangan besar. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle, terlihat bahwa meskipun konten kebijakan NST1 cukup komprehensif dalam merancang transformasi tata kelola, konteks politik yang otoritarian dan terbatasnya ruang demokrasi menjadi faktor penghambat utama. Sementara itu, melalui perspektif teori pembangunan Amartya Sen, pembangunan Rwanda masih belum sepenuhnya memenuhi dimensi kebebasan substantif, karena kebebasan sipil, kebebasan pers, dan partisipasi politik masyarakat tetap dibatasi.

Indeks tata kelola yang terkait dengan SDGs 16 menunjukkan pola awal menurun dan kemudian stagnan sepanjang periode NST1. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada perbaikan dalam aspek efisiensi birokrasi, rule of law, dan administrasi publik, faktor kebebasan politik dan sipil yang terbatas membuat indeks tidak mengalami peningkatan signifikan. Dengan kata lain, Rwanda berhasil

membangun institusi yang kuat secara administratif, tetapi belum mampu memperluas ruang kebebasan yang menjadi inti dari SDGs 16.

Untuk meningkatkan capaian SDGs 16 di masa mendatang, Rwanda perlu menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perluasan kebebasan politik, sipil, dan media. Tanpa adanya keseimbangan tersebut, indeks tata kelola akan tetap stagnan, dan transformasi nasional yang diusung NST1 tidak akan sepenuhnya sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keadilan, perdamaian, dan institusi yang kuat.

